



Analisis Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Gilang Nur Rahman Sidik¹, Nurdiana Mulyantini²

Universitas Galuh^{1,2}

Email : dianamulya@ymail.com

ABSTRACT : *This research is motivated by the results of preliminary observations that there are still service programs that have not been realized according to the specified time. Most people feel that the services provided by the village head and his staff have not yet touched the real needs of the community. Lack of awareness from local village government officials in the service process. The method used is a qualitative descriptive research method. The population in this study was 8 people. The sampling technique used the total sample technique, thus the sample in this study was 8 people. The data collection technique used a questionnaire. The results of the study are as follows: The Leadership of the Head of Cikunir Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency in Activities So far, it has been in accordance with the main function of the leader by carrying out his leadership properly and correctly, meaning, based on the rules of the game that have been agreed upon and determined by the organization. such as the preparation of the vision and mission and goals of the organization, so that from planning to accountability is directed at the goals that have been set, becoming a motivator, decision maker, performance assessment, dynamic and catalyst for the organization, stabilizer and supervisor. The implementation of public services in Cikunir Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency, has been in accordance with the Decree of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 63 of 2004 concerning Minimum Service Standards, such as in terms of transparency, accountability, conditional, participatory, equal rights, and balance of rights and obligations. The obstacles faced by the village head in improving public services in Cikunir Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency, are human resources, facilities and infrastructure, education and human resources skills. Efforts that have been made by the Village Head in Improving Public Services in Cikunir Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency, are improving the quality of human resources through education and training; adding/completing service facilities and infrastructure; and improving employee skills through on the job training.*

Keywords: *Leadership, Village Head, Public Services*

ABSTRAK : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi pendahuluan bahwa Masih adanya program pelayanan yang tidak terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Sebagian besar masyarakat merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kepala desa dan aparatnya masih belum menyentuh kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Kurang kesadaran dari aparat pemerintahan desa setempat dalam proses pelayanan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampel, dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Kepemimpinan Kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Aktivitas Selama ini, telah sesuai dengan fungsi utama pemimpin dengan menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar, artinya, berdasarkan aturan main yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi. seperti penyusunan visi dan misi serta tujuan organisasi, sehingga mulai perencanaan hingga pertanggung jawaban diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, menjadi motivator, pembuatan keputusan, penilaian kinerja, dinamisator dan katalisator organisasi, stabilisator dan supervisor. Pelaksanaan pelayanan publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal, seperti dalam hal transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban Hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adalah SDM, sarana prasarana, pendidikan dan keterampilan SDM. Upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan; menambah/melengkapi sarana dan prasarana pelayanan; dan meningkatkan keterampilan pegawai melalui *on the job training*.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik

1. PENDAHULUAN

Saat ini sistem pemerintahan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang “Pemerintahan Daerah”, mengatur khusus tentang Pemerintahan Desa, Pasal 200 Ayat (1) mengatur bahwa “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Dengan demikian Jika melihat bunyi pasal tersebut bahwa Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten/kota dimana Pemerintahan Desa ini terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa dapat dimisalkan sebagai sebuah miniatur negara, sebab desa sejak dahulu telah memperaktekkan nilai-nilai demokratis mulai dari pemilihan kepala desa secara langsung serta penggalian dana yang bersumber dari swadaya masyarakatnya sendiri. Sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, lembaga masyarakat setingkat desa telah mewarnai corak pemerintahan pada jaman Hindia Belanda. Dengan demikian usia keberadaan pemerintahan desa lebih tua dibandingkan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri.

H. W. Widjaja (2003 :26) memberikan definisi desa sebagai berikut:

Desa atau disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan dibawah kabupaten”

Dengan demikian desa merupakan kumpulan dari masyarakat hukum, memiliki kewenangan mengatur, dan mengurus urusan kepentingan masyarakat desa menurut adat istiadat setempat. Tentunya adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional, selain itu desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten.

Desa pada dasarnya sejak dahulu telah melaksanakan prinsip Otonomi secara mandiri, yang dikenal dengan istilah Otonomi Desa. Pengertian otonomi Desa, menurut pendapat dari Bayu Suryaningrat “Otonomi desa adalah wewenang dan kewajiban desa untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Suryaningrat, 1979: 150). Dengan adanya otonomi tersebut, desa

dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, salah satunya ada pada kemampuan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pada dasarnya kepemimpinan yang ada di masyarakat desa terbagi kedalam dua bagian, yakni kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal merupakan kepemimpinan yang memiliki legalitas sah serta diangkat secara formal, dalam hal ini Kepala Desa dan Pamong Desa merupakan orang-orang yang menduduki jabatan pemimpin formal. Sedangkan kepemimpinan informal merupakan kepemimpinan yang tidak diangkat secara formal sehingga tidak memiliki legalitas kuat atau sah. Kepemimpinan informal diakui sebagai pemimpin berdasarkan pengakuan dan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin tersebut, seperti tokoh agama, dan tokoh adat.

Adapun kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang menempatkan hidup sebagai pelayanan dan bukan hanya pada karir semata. Pada saat ini dapat dilihat betapa besarnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan, terutama dari para pemimpin di daerah, sebab melalui kepemimpinan yang baik akan tercipta perubahan yang positif. Spirit pelayanan ini semestinya menyerap dalam sanubari seluruh anggota masyarakat, karena pelayanan merupakan salah satu sumber kebahagiaan walaupun tidak akan dapat kebahagiaan itu secara langsung melainkan sebagai hasil tambah dan nilai tambah dari pelayanan yang dilakukan. Pelayanan yang diberikan secara ikhlas memberi kebahagiaan kepada yang dilayani dan yang melayani.

Hasil studi pendahuluan melalui kegiatan observasi yang penulis lakukan di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, terlihat bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Kepala Desa dan pegawainya masih kurang maksimal. Hal ini terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih adanya program pelayanan yang tidak terealisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
2. Sebagian besar masyarakat merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kepala desa dan aparatnya masih belum menyentuh kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.
3. Kurang kesadaran dari aparat pemerintahan desa setempat dalam proses pelayanan.

Kenyataan tersebut disebabkan karena kepemimpinan kepala desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, belum memenuhi tuntutan kepemimpinan yang efektif. Hal ini tampak dengan adanya indikasi sebagai berikut.

1. Kepala desa kurang mampu menjalankan fungsi sebagai konseptor utama yang merupakan visi dan misi serta tujuan organisasi, sehingga mulai perencanaan hingga pertanggung jawaban diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan.
2. Kepala desa kurang mampu menjadi motivator, yaitu orang yang mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada bawahannya untuk bekerja dengan optimal.
3. Kepala desa kurang mampu membina, melatih, mendidik, mengawasi, menilai, dan memberikan contoh kerja terbaik bagi seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dan hasilnya akan dilaporkan ke dalam bentuk tesis dengan judul, **“ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIKUNIR KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA**

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan cenderung bersifat naratif daripada angka-angka yang hasil analisisnya berupa uraian-uraian yang sangat deskriptif dan berdasarkan pada analisis data secara induktif (Maleong, 2004 : 2).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Aktivitas Selama ini

Kepemimpinan Kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Aktivitas Selama ini, telah sesuai dengan fungsi utama pemimpin dengan menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar, artinya, berdasarkan aturan main yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi. seperti penyusunan visi dan misi serta tujuan organisasi, sehingga mulai perencanaan hingga pertanggung jawaban diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, menjadi motivator, pembuatan keputusan, penilaian kinerja, dinamisator dan katalisator organisasi, stabilisator dan supervisor.

Hasil di atas sejalan dengan pendapat kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di dalam menggerakkan para bawahannya, sehingga kecakapan, kemampuan serta disiplin pegawai dapat ditingkatkan, sehingga tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai sesuai dengan target.

Tujuan/fungsi kepemimpinan menurut Siagian (2003:48) bahwa:

Fungsi utama pemimpin adalah menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar, artinya, berdasarkan aturan main yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi. Fungsi-fungsi utama yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.

1. Pengelola organisasi atau pengendali utama manajemen berorganisasi. Pemimpin yang menjalankan fungsi utama adalah konseptor utama yang merupakan visi dan misi serta tujuan organisasi, sehingga mulai perencanaan hingga pertanggung jawaban diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan.
2. Motivator, yaitu orang yang mendorong dan memberikan dukungan penuh kepada bawahannya untuk bekerja dengan optimal.
3. Pembuatan keputusan yang akan memengaruhi perkembangan dan kemajuan organisasi serta kesejahteraan para anggotanya.
4. Penilai kinerja karyawannya yang akan memberikan penghargaan bagi seluruh prestasi kerja bawahannya.
5. Dinamisator dan katalisator organisasi, yaitu orang yang memajukan organisasi dan mengendalikan situasi dan kondisi yang akan berpengaruh terhadap kemajuan atau kemunduran organisasi.
6. Stabilisator, yaitu orang yang mempunyai kapabilitas terkuat dalam mempertahankan eksistensi organisasi.
7. Supervisor, yaitu yang membina, melatih, mendidik, mengawasi, menilai, dan memberikan contoh kerja terbaik bagi seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya.

Analisis Pelaksanaan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pelayanan publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal, seperti dalam hal transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah:

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Nugroho (2004 : 75) mengatakan bahwa:

Tugas Pelayanan Publik adalah memberikan pelayanan, kepada umum tanpa membedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu menjangkaunya.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Berdasarkan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan asas-asas pelayanan sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. **Akuntabilitas**

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. **Kondisional**

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektifitas.

4. **Partisipatif**

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. **Kesamaan hak**

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, gender, dan status ekonomi.

6. **Keseimbangan hak dan kewajiban**

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan uraian diatas maka Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya perlu memberikan pelayanan yang baik dalam hal pelayanan publik, karena hal tersebut merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Analisis Hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adalah sebagai berikut:

Hambatan pertama yang dihadapi oleh Kepala Desa adalah SDM pegawai itu sendiri. Untuk mengetahui sejauhmana SDM pegawai dilakukan wawancara dengan Desa Cikunir

Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya diperoleh keterangan bahwa SDM menjadi salah satu kendala dalam penerapan startaegi pelayanan yang diterapkan oleh kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Sebab tidak semua pegawai memiliki kompetensi yang sama dan disukung oleh keterampilan dalam proses pelayanan, sehingga terkadang terjadi salah pengertian antara instruksi dengan realisasi. Dampak dari semua itu pelayanan menjadi terkesan lambat.

Hambatan kedua yang dihadapi oleh pegawai adalah sarana prasarana. Untuk mengetahui sejauhmana sarana dan prasarana menjadi penghambat pelaksanaan strategi pelayanan maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya diperoleh keterangan bahwa: selain SDM. Sarana prasarana penunjang tercapainya standar pelayanan menjadi salah satu kendala. Sebab sarana yang tersedia kurang memadai, seperti sempitnya ruang tunggu yang tersedia sempit, sehingga apabila ada pelayanan yang masal perlu dipindahkan ke ruangan lain.

Hambatan ketiga yang dihadapi oleh pegawai adalah pendidikan pegawai. Untuk mengetahui sejauhmana pendidikan menjadi penghambat pelaksanaan strategi pelayanan maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya diperoleh keterangan bahwa: pendidikan sangat membantu tercapainya strategi pelayanan. Sebab proses pelayanan yang dianjurkan sudah modern dan menggunakan sistem komputerisasi dan pengetahuan tersebut bisa diperoleh melalui pendidikan.

Hambatan keempat yang dihadapi oleh pegawai adalah keterampilan pegawai. Untuk mengetahui sejauhmana keterampilan menjadi penghambat pelaksanaan strategi pelayanan maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya diperoleh keterangan bahwa: keterampilan sangat membantu tercapainya strategi pelayanan. Sebab proses pelayanan menuntut keterampilan pegawai dalam banyak hal. Pegawai dituntut untuk terampil memaksimalkan waktu dalam proses pemberian pelayanan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh camat untuk menerapkan strategi pemberian pelayanan. Misalnya SDM, sarana prasarana, pendidikan serta keterampilan pegawai itu sendiri. Hal ini menjadi penghambat berjalannya strategi yang menjadi acuan yang dilaksanakan oleh kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Analisis Upaya yang Dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut.

Upaya pertama yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam strategi pelayanan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik secara formal maupun informal Pendidikan formal seperti melanjutkan jenjang pendidikan ke-S-1 bagi pegawai yang hanya berpendidikan D-3, melalui pemberian izin belajar. Sedangkan pendidikan non formal seperti seminar, diklat yang diselenggarakan oleh instansi dan sebagainya.

Upaya kedua yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam strategi pelayanan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adalah dengan menambah/melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, seperti penambahan perangkat komputer, penambahan Wifi untuk mempermudah akses, dan pembuatan ruang tunggu tambahan untuk menunggu antrian pelayanan.

Upaya ketiga yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam strategi pelayanan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adalah dengan meningkatkan keterampilan pegawai melalui *on the job training*, seperti pelatihan pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ada beberapa upaya yang telah dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam strategi pelayanan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Upaya dimaksud adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, menambah/melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, meningkatkan keterampilan pegawai melalui *on the job training*.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepemimpinan Kepala Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Aktivitas Selama ini, telah sesuai dengan fungsi utama pemimpin dengan

menjalankan kepemimpinannya dengan baik dan benar, artinya, berdasarkan aturan main yang telah disepakati dan ditetapkan oleh organisasi. seperti penyusunan visi dan misi serta tujuan organisasi, sehingga mulai perencanaan hingga pertanggung jawaban diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan, menjadi motivator, pembuatan keputusan, penilaian kinerja, dinamisator dan katalisator organisasi, stabilisator dan supervisor.

2. Pelaksanaan pelayanan publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, telah sesuai dengan Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal, seperti dalam hal transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban
3. Hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adalah SDM, sarana prasarana, pendidikan dan keterampilan SDM.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa Cikunir Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan; menambah/melengkapi sarana dan prasarana pelayanan; dan meningkatkan keterampilan pegawai melalui *on the job training*

DAFTAR PUSTAKA

- _____.2003. *Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____.2010 *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal itu*. Jakarta: CV Rajawali.
- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality Improvement as A Strategy to Build Pesantren's Brand Credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion Mix, Individual Internal Environment, And Purchase Decision Making in Minimarket. In *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Vol. 21, Issue 1).
- Budiman, Arief, 2001. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Kinerja Staf dan Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent Management in Facing The Demand Of Environmental Changes: A Study In Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>

- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Kartono, Kartini 2003 *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human Capital Management Model: A Perspective of Internal Supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nasution dan Subino 2008. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nasution, MN, 2008. *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' Perceptions of Academic Supervision in a Pandemic Era; Phenomenological Review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own Revenue, Decentralization and Local Financial Independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Sastropoetro, Santoso.1988. *Partisipasi Komunimasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*.
- Siagian, Sondang P. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono 2001 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Syafiie, Inu Kencana 2003. *Kepemimipinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Trisnamansyah dan Sukmadinata 2004. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, H.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rineka Cipta